

**PEMETAAN KONFLIK IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL
HUTAN KAYU DALAM HUTAN TANAMAN INDUSTRI DI
KECAMATAN SIBERUT UTARA DAN KECAMATAN
SIBERUT TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mendapat Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Konflik hutan yang terjadi di Kecamatan Siberut Tengah dan Kecamatan Siberut Utara dipicu karena PT. Biomass Andalan Energi mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Kecamatan Siberut Utara dan Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Namun hal ini ditentang oleh masyarakat adat Mentawai yang menganggap hutan yang akan dijadikan kawasan industri tersebut merupakan tanah ulayat mereka. Sementara itu, resolusi konflik yang telah dilakukan juga tidak kunjung menyelesaikan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemetaan konflik dengan cara memaparkan kronologis konflik, faktor penyebab konflik dan bentuk resolusi konflik yang telah dilakukan serta juga solusi yang ditawarkan untuk dapat menyelesaikan konflik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif metode studi kasus dan menggunakan teori dari Simon Fisher mengenai teori penyebab konflik dan teori dari Wirawan mengenai resolusi konflik. Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi disebabkan oleh tiga faktor yaitu pertama, penetapan kawasan produksi dan penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri di kawasan lahan milik masyarakat di Siberut Utara dan Siberut Tengah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018. Kedua, terdapat prosedur yang cacat dan informasi yang bersifat manipulatif yang diberikan oleh PT. Biomass Andalan Energi kepada masyarakat dalam proses perizinan, Ketiga, terdapat perbedaan pemaknaan konsep hutan antara masyarakat adat Mentawai dengan negara dan perusahaan. Penelitian ini juga menunjukkan upaya resolusi konflik yang telah dilakukan seperti negosiasi dan surat penolakan dari masyarakat ternyata belum dapat menyelesaikan konflik karena sejauh ini belum ada kesepakatan yang dicapai oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Kata Kunci: Konflik Hutan, Hutan Tanaman Industri, Resolusi Konflik



ABSTRACT

The forest conflicts that occurred in Central Siberut and North Siberut Districts were triggered because PT. Biomass Andalan Energi obtained a Business Permit for the Utilization of Timber Forest Products in Industrial Plantation Forests (IUPHHK-HTI) in North Siberut District and Central Siberut District, Mentawai Islands Regency. However, this is opposed by the Mentawai indigenous people who consider the forest that will be used as an industrial area to be their customary land. Meanwhile, the conflict resolution that has been done also does not solve the problem. This study aims to explain the chronology of the conflict, the factors causing the conflict and the forms of conflict resolution that have been carried out as well as the solutions offered to resolve the conflict. This research was conducted using a qualitative approach, case study method and using Simon Fisher's theory of the causes of conflict and Wirawan's theory of conflict resolution. This research shows that the conflicts that occurred were caused by 3 factors, namely first, the determination of production areas and the issuance of Business Permits for the Utilization of Timber Forest Products in Industrial Plantation Forests in community-owned land areas in North Siberut and Central Siberut by the Ministry of Environment and Forestry in 2018. Second, there are flawed procedures and manipulative information provided by PT. Biomass Andalan Energi to the community in the licensing process. Third, there are differences in the meaning of the concept of forest between Mentawai indigenous people and the state and companies. This research also shows that the conflict resolution efforts that have been carried out, such as negotiations and rejection from the community, have not been able to resolve the conflict because so far no agreement has been reached by the conflicting parties.

Keywords: *Forest Conflict, Industrial Plantation Forest, Conflict Resolution*

